

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP
PENERIMAAN RETRIBUSI SAMPAH DI KOTA JAYAPURA**

*AN ANALYSIS ON FACTORS AFFECTING GARBAGE
RETRIBUTION REVENUE IN JAYAPURA CITY*

SARAH KARUBABA



PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2007

TESIS

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PENERIMAAN RETRIBUSI SAMPAH DI KOTA JAYAPURA

Disusun dan diajukan oleh :

SARAH KARUBABA

Nomor Pokok P2600204512

Telah di pertahankan didepan panitia ujian tesis
Pada tanggal 17 Maret 2007
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui
Komisi Penasehat

Prof. Dr. H. Rahardjo Adisasmita, M. Ec
Ketua

Ketua Program
Magister Keuangan Daerah

Dra. Adolf Z.D Siahay, SE, M. Si., Ak
Anggota

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Hasanuddin

Prof. Dr. H. Muhammad Yunus Zain, MA

Prof. Dr. dr. A. Razak Thaha, M.Sc

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP
PENERIMAAN RETRIBUSI SAMPAH DI KOTA JAYAPURA**

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister

**Program Studi
Magister Keuangan Daerah**

Disusun dan diajukan oleh

SARAH KARUBABA

Kepada

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2007**

ABSTRAK

SARAH KARUBABA. *Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Penerimaan Retribusi Sampah di Kota Jayapura.* (dibimbing oleh Rahardjo Adisasmita dan Adolf Z.D. Siahay)

Penelitian ini bertujuan mengetahui upaya-upaya yang mungkin dilaksanakan dalam meningkatkan penerimaan retribusi sampah di Kota Jayapura. Jenis dan sumber data penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Jayapura, Dinas Kebersihan Kota Jayapura, Bagian Keuangan Setda Kota Jayapura, Kantor Catatan Sipil Kota Jayapura dan Badan Pusat Statistik. Data dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif melalui uji *student* dan uji *fisher* serta regresi berganda

Penelitian ini menghasilkan model penelitian dengan *R square* sebesar 0,981 dan uji *F* sebesar 102,519 dengan tingkat signifikan *p* dengan nilai 0,000. Dengan demikian, penambahan jumlah pelanggan, total biaya dan tempat penampungan sementara secara signifikan berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan retribusi sampah.

ABSTRACT

SARAH KARUBABA. *An Analysis on Factors Affecting Garbage Retribution Revenue in Jayapura City* (supervised by Rahardjo Adisasmita and Adolf Z. D. Siahay)

This research aimed to find out efforts that could be done in increase garbages retribution revenue in Jayapura City.

The data in this research consisted of secondary data obtained from Regional Income Service of Jayapura City, Cleanliness Service of Jayapura City, Financial Unit of Regional Secretary of Jayapura City, Vital Statistic Service of Jayapura City, and Statistic Centre Board. They were then analyzed qualitatively and quantitatively through student test, fisher test, and multiple regression.

The results yield a model research with R square 0,981 and F test 102,519 with significant level of P value 0,000. It is also indicated that the addition of the number of cutomers, cost total, and temporary garbage can have a significant influence on the increase of garbage retribution revenue.

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat Rahmat-Nyalah sehingga Tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Gagasan untuk menulis permasalahan ini timbul dari hasil pengamatan penulis terhadap penerimaan retribusi sampah yang sangat jauh dari tingkat potensialnya, akibat kurang optimalnya pengelolaan persampahan, khususnya di Kota Jayapura. Oleh karena itu Penulis bermaksud untuk melakukan analisis terhadap beberapa faktor yang berpengaruh terhadap penerimaan retribusi sampah.

Banyak kendala yang dihadapi oleh penulis dalam rangka penyusunan Tesis ini, yang hanya berkat bantuan berbagai pihak, sehingga Tesis ini selesai pada waktunya. Dalam kesempatan ini penulis dengan tulus menyampaikan terimakasih kepada Prof. Dr. H. Rahardjo Adisasmita, M.Ec sebagai Pembimbing I dan Drs. Adolf Siahay, SE, M.Si, Ak sebagai Pembimbing II atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan mulai dari pengembangan minat terhadap permasalahan penelitian ini dan pelaksanaan penelitiannya sampai dengan penulisan Tesis.

Terimakasih juga Penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Bupati Kabupaten Jayapura atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti pendidikan Pascasarjana di Program Magister Keuangan Daerah Unhas.
2. Bapak Sekda Kabupaten Jayapura
3. Bapak Kadis Pendapatan Daerah Kota Jayapura.
4. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Program Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin.
5. Segenap pengelola Program Pascasarjana Magister Keuangan Daerah.
6. Bapak dan Ibu sebagai orang tua serta suami dan anak-anak tercinta.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga senantiasa penulis memperoleh sukses selama menempuh studi pada Program Pascasarjana Magister Keuangan Daerah Universitas Hasanuddin Makassar.

Semoga Tesis ini bermanfaat bagi pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Jayapura, November 2006

SARAH KARUBABA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Masalah Pokok	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Sumber Pembiayaan Untuk Desentralisasi	11
B. Pendapatan Asli Daerah	15
C. Retribusi Daerah	18
D. Retribusi Sampah 23	
E. Retribusi Sebagai Sumber Pembiayaan	25
F. Kerangka Pikir	30

	G. Hipotesis	32
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Lokasi Penelitian	3
	B. Jenis dan Sumber Data	33
	C. Metode Pengumpulan Data	34
	D. Teknik Analisis Data	35
	E. Definisi Operasional	37
BAB IV	GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN	
	1. Kota Jayapura	35
	A. Letak Geografis	35
	B. Kepadatan Penduduk	40
	C. Tingkat Pendidikan	42
	D. Pendapatan Masyarakat	43
	E. Distribusi Pendapatan	45
	2. Struktur Organisasi Dinas Kebersihan Kota (Jumlah	
BAB V	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Perkembangan Jumlah Pelanggan	46
	B. Perkembangan Total Biaya	47

C. Perkembangan Jumlah TPS	48
D. Perkembangan Penerimaan Retribusi Sampah	49
E. Analisis Signifikansi Pengaruh Jumlah Pelanggan, Total Biaya dan Jumlah TPS terhadap Penerimaan Retribusi Sampah Kota Jayapura	50
F. Pembahasan dan Implikasi Hasil Penerimaan	59
G. Kontribusi Retribusi Sampah Terhadap PAD	60
 BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	62
B. Saran-Saran	63
 DAFTAR PUSTAKA	64
 DAFTAR PUSTAKA	58
 LAMPIRAN	61

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Produksi Volume Sampel Per Hari Tahun 2004 dan Tahun 2005 di Kota Jayapura.	8
Tabel 2.	Tabel Realisasi dan Target Penerimaan Pajak dan Retribusi Kota Jayapura sampai dengan tahun 2005	13
Tabel 3.	Jumlah Alokasi Dana Pembangunan Kota Jayapura Tahun 2004-2005	14
Tabel 4.	Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura Tahun 2004 – 2005	15
Tabel 5.	Besarnya tarif pelanggan sampah di Kota Jayapura berlaku sebelum dan sesudah tahun 1998.	25
Tabel 6.	Jumlah Penduduk Kota Jayapura Tahun 2005	40
Tabel 7	Jumlah Penduduk Kota Jayapura Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin	42
Tabel 8	Perkembangan dan Pertumbuhan PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Kota Jayapura 1999 – 2005	43
Tabel 9.	Perkembangan Jumlah Pelanggan	46
Tabel 10.	Perkembangan Total Biaya	47
Tabel 11	Perkembangan Jumlah TPS	49
Tabel 12.	Perkembangan Penerimaan Retribusi Sampah	50
Tabel 13	Hasil Analisis Pengaruh Jumlah Pelanggan (X1), Total Biaya (X2), Dan Jumlah TPS (X3) Terhadap Penerimaan Retribusi Sampah (Y) Di Kota Jayapura.	52
Tabel 14	Analisis varians pengaruh jumlah pelanggan, total biaya dan jumlah TPS terhadap penerimaan retribusi sampah di Kota Jayapura.....	61

DAFTAR GAMBAR

1. Skema Kerangka Pikir	31
-------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan semua kegiatan pembangunan baik yang termasuk maupun yang tidak termasuk urusan Rumah Tangga Daerah yang meliputi berbagai sumber pembiayaan, baik yang berasal dari pemerintah (APBD dan APBN) dan dari masyarakat. Di era sebelum reformasi, kegiatan pembangunan dilakukan oleh pemerintah dibiayai melalui pemerintah pusat sebagai pelaksana asas dekonsentrasi, Pemerintah Daerah Tingkat I, Pemerintah Tingkat II dan Pemerintah Desa sebagai pelaksana asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Namun setelah era reformasi yang ditandai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah serta UU Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan daerah antara pemerintah pusat dan daerah, maka fungsi pemerintahan di daerah terkecuali fungsi-fungsi tertentu telah diserahkan sepenuhnya oleh daerah. Era ini dinamakan pula sebagai era otonomi daerah. Namun dalam pelaksanaan undang-undang ini, penyelenggaraan pemerintahan dan hubungan keuangan belum dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan amanat Undang-Undang

Dasar Negara RI tahun 1945 bahwa tiap-tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 18 A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 juga mengamanatkan hubungan keuangan, pelayanan umum serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Hal ini merupakan landasan filosofis dan landasan konstitusional untuk pembentukan Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah. Menurut Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, penyerahan pelimpahan dan penugasan urusan pemerintahan kepada daerah secara nyata dan bertanggung jawab harus diikuti dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil, termasuk perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah sebagai daerah otonomi. Penyelenggaraan pemerintahan dan

pelayanan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

Pendanaan penyelenggaraan pemerintahan agar terlaksana secara efisien dan efektif serta untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan, maka diatur pendanaan penyelenggaraan pemerintahan. Yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan keuangan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab pemerintah dibiayai dari APBN. Baik kewenangan pusat didekonsentrasikan kepada Gubernur atau ditugaskan kepada pemerintah daerah dan atau Desa dalam rangka tugas pembantuan.

Sumber-sumber pendanaan pelaksanaan pemerintahan yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan lain Pendapatan Yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengadaaan kekayaan daerah yang sah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mengganti pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Tjahyo Supriatna (1993) menyatakan bahwa ada 3 esensi dasar dari otonomi yang nyata dan bertanggung jawab yaitu :

1. Otonomi tersebut harus dapat menjamin kestabilan persatuan dan kesatuan nasional.
2. Otonomi harus menjaga hubungan yang harmonis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
3. Otonomi harus dapat menjamin pembangunan daerah.

Kemandirian keuangan daerah rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, tampaknya bukan diartikan sebagai suatu keharusan bagi setiap daerah otonom untuk membiayai seluruh keperluannya dari Pendapatan Asli Daerah, walaupun demikian Yosef Riwu Kuho (1988) mengemukakan bahwa kemandirian keuangan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah yaitu faktor manusianya, keuangan, peralatan, organisasi dan manajemen.

Tuntutan pembangunan akibat tuntutan kesejahteraan masyarakat dirasakan semakin meningkat pula, maka kebutuhan akan dana rutin maupun pembangunan dari tahun ke tahun semakin bertambah. Pemerintah daerah dituntut untuk dapat menjadi potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah seperti yang dituangkan di dalam undang-undang RI Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah,

sehingga diharapkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah Provinsi.

Demikian juga pemerintah Kota Jayapura berupaya secara maksimal menjadi potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah karena sumber penerimaan dari dana perimbangan masih belum mencukupi. Sebagaimana bunyi Undang-Undang Negara RI Nomor 33 Tahun 2004 pasal 6 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan pemerintah daerah bahwa yang menjadi sumber pendapatan asli daerah adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dari beberapa jenis penerimaan sumber pendapatan asli daerah tersebut salah satunya lewat penerimaan retribusi sampai sesuai Perda Kota Jayapura Nomor 21 Tahun 2001 tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

Penanganan sampah akhir-akhir ini sejalan dengan peningkatan pembangunan kawasan perkotaan, sehingga menimbulkan problem tersendiri bagi masalah internal kota, seperti munculnya kawasan-kawasan kumuh akibat urbanisasi penduduk desa/pedalaman ke kota serta ketidaksiapan infrastruktur pendukung yang mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan akibat sampah.

Salah satu kebutuhan akan pelayanan kebersihan bagi penduduk Kota Jayapura adalah membutuhkan penanganan yang serius dan terkendali. Hal ini disebabkan oleh kemajuan akan pembangunan perkotaan dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dari tahun ke tahun sehingga dihadapkan dengan berbagai tantangan. Salah satu tantangan yang dihadapi dalam pelayanan perkotaan khususnya yang menyangkut kebersihan Kota Jayapura yang dinilai masih jauh dari memadai. Tugas Pemda Kota Jayapura khususnya Dinas Kebersihan Kota Jayapura yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang menyangkut pelayanan umum kepada masyarakat di bidang kebersihan dan pemakaman yang dilakukan setiap hari kerja maupun hari minggu/libur seperti :

- a. Pelayanan persampahan/kebersihan. Sampah rumah tangga, sampah pedagang kaki lima, sampah instansi pemerintah/BUMN/BUMD dan Swasta.
- b. Pelayanan pembabatan rumput dan penyapuan jalan protokol.
- c. Pelayanan penyedotan septick tank (WC) bagi yang membutuhkan.
- d. Pelayanan pemakaman bagi warga masyarakat Kota Jayapura yang membutuhkan.

Pelayanan penyedotan WC/Tinja sesuai laporan tahun 2003 bulan September rusak berat hingga tahun 2005 belum dapat dioperasikan, maka dengan sendirinya berpengaruh terhadap penerimaan pemerintah Kota Jayapura.

Pelayanan kebersihan baik pengangkutan sampah pada 3 (tiga) Distrik yaitu : Distrik Jayapura Utara, Distrik Jayapura Selatan dan Abepura. Sedangkan Distrik Muara Tami sampai saat ini belum tersentuh pelayanan kebersihan karena terbatas peralatan dan personil sehingga target pengelolaan retribusi tidak banyak diharapkan.

Jumlah timbunan sampah dari waktu ke waktu semakin bertambah. Hal ini terjadi akibat dari kemajuan pembangunan yang terjadi dengan pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi, kemajuan ekonomi masyarakat yang semakin meningkat mengikuti pendapatan/perkapita penduduk sehingga biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan pengangkutan sampah tidak efisien dengan volume timbunan sampah dan personil yang kurang sehingga hasil yang diharapkan tidak terlayani dengan baik. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya peningkatan pelayanan sampah secara efektif dan efisien dengan ketetapan hasil sesuai dengan harapan dan rencana.

Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.
Produksi Volume Sampel Per Hari Tahun 2004 dan Tahun 2005
di Kota Jayapura.

No.	Bulan	Tahun 2004			Tahun 2005		
		Produksi	Dilayani	%	Produksi	Dilayani	%
1.	Januari	960	462	48	27.435	12.276	44
2.	Februari	968	468	48	27.810	11.571	44
3.	Maret	976	475	49	27.838	12.555	45
4.	April	984	481	49	27.150	12.450	45
5.	Mei	992	488	49	28.117	12.896	45
6.	Juni	998	494	49	27.360	12.540	45
7.	Juli	012	512	50	28.365	12.989	5
8.	Agustus	1.018	518	52	28.932	13.160	45
9.	September	1.024	523	51	28.932	12.600	45
10.	Oktober	1.032	129	51	28.940	13.020	45
11.	November	1.053	552	52	30.387	12.200	43
12.	Desember	1.068	567	53	32.514	14.198	44
Jumlah		12.080	6.069	50	341.502	153.455	44,58

Sumber Data : Dinas Kebersihan Kota Jayapura, 2005

Berdasarkan data pada tabel 1 tampak bahwa mulai tahun 2004 sampai dengan tahun 2005 dari tahun ke tahun ada kenaikan volume produksi sampah, sedangkan yang dilayani rata-rata 44,58% sehingga yang nampak gap atau kesenjangan yang amat jauh, oleh karena itu karenanya perlu upaya-upaya untuk meningkatkan pelayanan sehingga

kesenjangan bisa ditekan dan perlu dirumuskan agar pelayanan pengangkutan sampah dapat sampai ke TPA dengan tidak menyita waktu dan dapat meningkat demi keadaan sekarang.

Dari latar belakang tersebut, maka penulis memilih judul pembahasan Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Penerimaan Retribusi Sampah di Kota Jayapura.

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penulisan ini sangat penting artinya, terutama sebagai acuan untuk melakukan pembahasan selanjutnya. Mengingat luasnya masalah yang diteliti, maka penulis akan membatasi pada :

1. Bagaimana pengaruh potensi pengelolaan retribusi sampah terhadap PAD ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan masalah yang dikemukakan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh potensi pengelolaan retribusi sampah terhadap PAD.

Adapun kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat :

1. Sebagai bahan masukan dan informasi bagi pemerintah Kota Jayapura dalam rangka merumuskan dan pelaksanaan pengambilan keputusan dalam upaya peningkatan penerimaan retribusi sampah.
2. Sebagai bahan referensi bagi masyarakat dalam rangka menambah wawasan sehubungan dengan retribusi sampah dalam kontribusinya terhadap kebersihan lingkungannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sumber Pembiayaan Untuk Desentralisasi

Sumber-sumber penerimaan pemerintah seperti yang datur antara lain d dalam PP Nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah; PP Nomor 66 tahun tentang retribusi daerah dan peraturan-peraturan daerah lainnya yang mengatur teknis pelaksanaan secara rinci seperti Perda Kota Jayapura nomor 17 Tahun 1998 tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, berikut sumber-sumber penerimaan pemerintah yang dapat digolongkan antara lain :

1. Pajak, yang dimaksud dengan pajak adalah pembayaran iuran oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tanpa balas jasa secara langsung;
2. Retribusi, yang dimaksud dengan retribusi adalah suatu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah dimana kita dapat

melihat adanya hubungan antara balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut.

3. Keuntungan dari perusahaan-perusahaan negara, penerimaan dari sumber ini merupakan penerimaan-penerimaan pemerintah dari hasil penjualan barang-barang yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan negara;
4. Sumbangan masyarakat untuk jasa-jasa yang diberikan oleh pemerintah seperti biaya-biaya perijinan atau pungutan sumbangan pada jalan raya tertentu;
5. Pinjaman, baik yang berasal dari luar negeri dapat berupa pinjaman bilateral maupun pinjaman multilateral atau dari dalam negeri yang bersumber dari pemerintah pusat, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, masyarakat dan sumber lainnya.

B. Retribusi Daerah

Sesuai pasal 1 angka 26 undang-undang nomor 34 tahun 2000, dinyatakan bahwa retribusi yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin

tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pungutan daerah sangat dipengaruhi oleh jasa yang diberikan pemerintah daerah dan yang diperlukan oleh masyarakat. Jasa pelayanan yang diberikan harus betul-betul nyata dan tidak dibuat-buat. Sedangkan pengertian retribusi menurut K.J. Davey, dinyatakan bahwa retribusi dibayar langsung oleh mereka yang menikmati suatu pelayanan dan biayanya dimaksudkan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya pelayanannya.

Suparmoko (2001) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jadi dalam hal retribusi daerah balas jasa dari adanya retribusi daerah tersebut langsung dapat ditunjuk.

Berdasarkan beberapa pengertian retribusi tersebut di atas, maka dapat dirumuskan ciri-ciri pokok retribusi daerah sebagai berikut :

1. Retribusi dipungut oleh daerah;
2. Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan dan langsung dapat ditunjuk;

3. Retribusi dikenakan pada siapa saja yang memanfaatkan jasa yang disediakan daerah.

Adapun jenis-jenis retribusi daerah yang dipungut oleh pemerintah Kota Jayapura sesuai dengan Perda yang ada, yaitu :

1. Retribusi pelayanan kesehatan;
2. Retribusi persampahan/keberhasilan
3. Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil;
4. Retribusi pelayanan pemakaman dan penguburan mayat;
5. Retribusi parkir di tepi jalan umum;
6. Retribusi pasir;
7. Retribusi air bersih;
8. Retribusi pemakaian kekayaan daerah;
9. Retribusi terminal;
10. Retribusi tempat khusus parkir;
11. Retribusi penyedotan kakus;
12. Retribusi rumah potong hewan;
13. Retribusi tempat pendaratan kapal;
14. Retribusi penjualan produksi usaha daerah;
15. Retribusi ijin peruntukkan penggunaan tanah;

16. Retribusi ijin mendirikan bangunan;
17. Retribusi ijin tempat penjualan minuman beralkohol;
18. Retribusi ijin gangguan;
19. Retribusi ijin trayek;
20. Retribusi ijin pengambilan hasil hutan ikutan.

Sumber penerimaan daerah yang berasal dari retribusi yang relatif besar sumbangannya adalah retribusi ijin mendirikan bangunan. Sedangkan retribusi yang lainnya memberikan sumbangan yang relatif kecil terhadap pendapatan asli daerah.

Selanjutnya dengan terbentuknya peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2001 tentang retribusi daerah, maka jenis-jenis retribusi yang dipungut oleh daerah mengalami perubahan, dimana retribusi daerah terbagi menjadi 3 (tiga) pengelompokan retribusi yang meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perijinan tertentu, dengan uraian sebagai berikut :

1. Retribusi jasa umum.

Adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan; jenis-jenis retribusi jasa umum, adalah :

- 1.1. Retribusi pelayanan kesehatan;
- 1.2. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
- 1.3. Retribusi penggantian bea cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil;
- 1.4. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat;
- 1.5. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
- 1.6. Retribusi pelayanan pasar;
- 1.7. Retribusi pengujian kendaraan bermotor,
- 1.8. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
- 1.9. Retribusi penggantian bea cetak peta;
- 1.10. Retribusi pengujian kapal periklanan.

2. Retribusi jasa usaha.

Adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta ;

Jenis-jenis retribusi jasa usaha, adalah :

- 2.1. Retribusi pemakaian kekayaan daerah;
- 2.2. Retribusi pasar grosir dan/atau per tokoan;
- 2.3. Retribusi tempat pelelangan;

- 2.4. Retribusi terminal;
- 2.5. Retribusi tempat khusus parkir;
- 2.6. Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
- 2.7. Retribusi penyedotan kakus;
- 2.8. Retribusi rumah potong hewan;
- 2.9. retribusi pelayanan pelabuhan kapal;
- 2.10. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga;
- 2.11. Retribusi penyebrangan di atas air;
- 2.12. Retribusi pengolahan limbah cair;
- 2.13. Retribusi penjualan produksi usaha daerah.

3. Retribusi Perijinan Tertentu

Adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis-jenis retribusi perijinan tertentu, adalah :

- 3.1. Retribusi ijin mendirikan bangunan;

- 3.2. Retribusi ijin tempat penjualan minuman beralkohol;
- 3.3. Retribusi ijin gangguan;
- 3.4. Retribusi ijin trayek;

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perijinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian ijin yang bersangkutan.

C. Retribusi Sampah

Retribusi sampah termasuk pada jenis retribusi jasa umum yang obyeknya adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, sedangkan subyeknya orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa sampah didasarkan pada kebijakan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. Dalam peraturan daerah Kota Jayapura Nomor 17 tahun 1998 tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan telah diatur mengenai prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi sampah yang dimaksudkan untuk menutup biaya

penyelenggaraan pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. Struktur penetapan besarnya tarif tersebut digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan, jenis serta volume sampah yang dihasilkan, besarnya tarif yang dikenakan pelanggan tersebut seperti tabel 2 berikut :

Tabel 2. Besarnya tarif pelanggan sampah di Kota Jayapura berlaku sebelum dan sesudah tahun 1998.

No.	Jenis pelanggan	Tarif/bulan (Rp)	
		1993 - 1997	1998 - Sekarang
1	Rumah tangga	2.500,-	6.500,-
2	Pertokoan	5.000,-	20.000,-
3	Bioskop	3.500,-	10.000,-
4	Rumah makan/warung	3.000,-	24.000,-
5	Hotel	7.500,-	25.000,-
6	Perusahaan	6.000,-	20.000,-

Sumber Data : Perda Kota Jayapura.

D. Retribusi Sebagai Sumber Pembiayaan

Adapun pengertian biaya menurut Don R. Hansen dan Maryane M. Mawen adalah kas atau nilai ekuivalen kas yang dikembangkan untuk

mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memberikan manfaat saat ini atau masa yang akan datang bagi organisasi. Biaya ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu biaya yang langsung dan biaya dan tidak langsung, terdapat dalam buku Akuntansi Biaya untuk manajemen Mulyadi (1984 : 31) biaya langsung adalah biaya-biaya yang mudah diidentifikasi atau diperhitungkan secara langsung kepada produk. Termasuk dalam biaya langsung adalah biaya bahan dan tenaga kerja langsung. Sedangkan biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak mudah diidentifikasi secara langsung kepada produk atau jasa. Pada dasarnya biaya tidak langsung ini biaya bersama, umumnya timbul jika lebih dari satu divisi menggunakan fasilitas perusahaan/organisasi secara bersama. Biaya seperti ini menurut Abdul Halim dan Bambang Supomo (1990 : 133) harus dialokasikan kepada setiap divisi sesuai dengan manfaat yang dinikmatinya. Sedangkan pengelompokkan biaya lain terdapat dalam buku Mulyadi (1984:57) berdasarkan tingkah lakunya dalam hubungan dengan perubahan volume kegiatan, biaya dapat dibagi menjadi dua golongan biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap atau biaya kapasitas merupakan biaya untuk mempertahankan kemampuan beroperasi perusahaan pada tingkat kapasitas tertentu. Biaya variabel

merupakan biaya yang secara total berfluktuasi secara langsung sebanding dengan perubahan volume kegiatan.

Dalam teorinya biaya retribusi dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu : Retribusi di bawah biaya dan retribusi di atas biaya. Adapun untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Retribusi di bawah biaya

Merupakan konsep dasar untuk mengenakan retribusi biasanya menyarankan bahwa biaya retribusi didasarkan pada *total cost* dari pelayanan yang disediakan. Namun pengujian teoritis dari retribusi melibatkan beberapa kompromi, hal ini mengakibatkan retribusi menjadi di bawah tingkat *full cost* dan subsidi dari penerimaan umum. Terdapat dalam buku Amarullah (1998:145) ada empat alasan utama mengapa hal ini terjadi, alasan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1.1. Timbul apabila suatu pelayanan pada dasarnya adalah merupakan suatu *publik goods* yang disediakan karena keuntungannya kolektif, tetapi suatu retribusi dikenakan untuk mendisiplinkan konsumsi. Pembebanan harus ditetapkan pada suatu tingkat kalkulasi untuk menghindari pemborosan tetapi memperkenankan tingkat konsumsi minuman yang

utama oleh seluruh kelompok pendapatan. Contoh retribusi ini adalah pembebanan resep kesehatan.

- 1.2. Untuk retribusi di bawah biaya (subsidi) terjadi apabila suatu pelayanan merupakan bagian dari swasta dan sebagian lagi merupakan *publik goods*. Hal ini memberikan keuntungan kepada individu pemakai, tetapi konsumsinya perlu didorong bagi kepentingan tabungan atau keuntungan masyarakat. Sebagai contoh adalah tarif kereta api dan bus disubsidi agar mendorong masyarakat untuk menggunakan angkutan umum dari pada mobil pribadi, sebagai alat untuk menurunkan kemacetan lalu lintas dan pengeluaran biaya pembangunan jalan baru.
- 1.3. Pelayanan yang seluruhnya *private good* dapat disubsidi jika hal ini merupakan permintaan yang populer dan penguasa enggan menghadapi masyarakat dengan *full cost*. Hal ini seperti misalnya penyediaan fasilitas rekreasi dari kolam renang.
- 1.4. *Privatet good* merupakan retribusi di bawah biaya (disubsidi) sebab hal itu dianggap sebagai suatu

kebutuhan dasar manusia dan kelompok berpenghasilan rendah, sehingga tidak dapat diharapkan *full cost*.

2. Retribusi di atas biaya

Dalam beberapa hal retribusi mungkin didasarkan pada *recovering* dari pada *full cost* dari suatu pelayanan, yaitu atas dasar mencari keuntungan. Menurut Amarullah (1998 : 147) ada tiga kasus mengapa hal ini terjadi, kasus-kasus tersebut antara lain :

- 2.1. Retribusi dikenakan di atas biaya untuk tinjauan pengaturan yang melibatkan sedikit biaya langsung. Contohnya adalah waktu untuk parkir.
- 2.2. Retribusi mungkin dikenakan pada tingkat di atas biaya guna memperkuat pengaruh disiplin mereka atas konsumsi. Contoh adalah retribusi telepon yang dibagi sesuai waktu yang ada, sehingga tidak terjadi kemacetan pada saat jam sibuk.
- 2.3. Retribusi dikenakan di atas biaya jika permintaan pelayanan yang cukup banyak dan masyarakat ingin membayar tinggi untuk hal ini karena tingkat keperluan atau popularitas dan keterbatasan penawaran jasa retribusi.

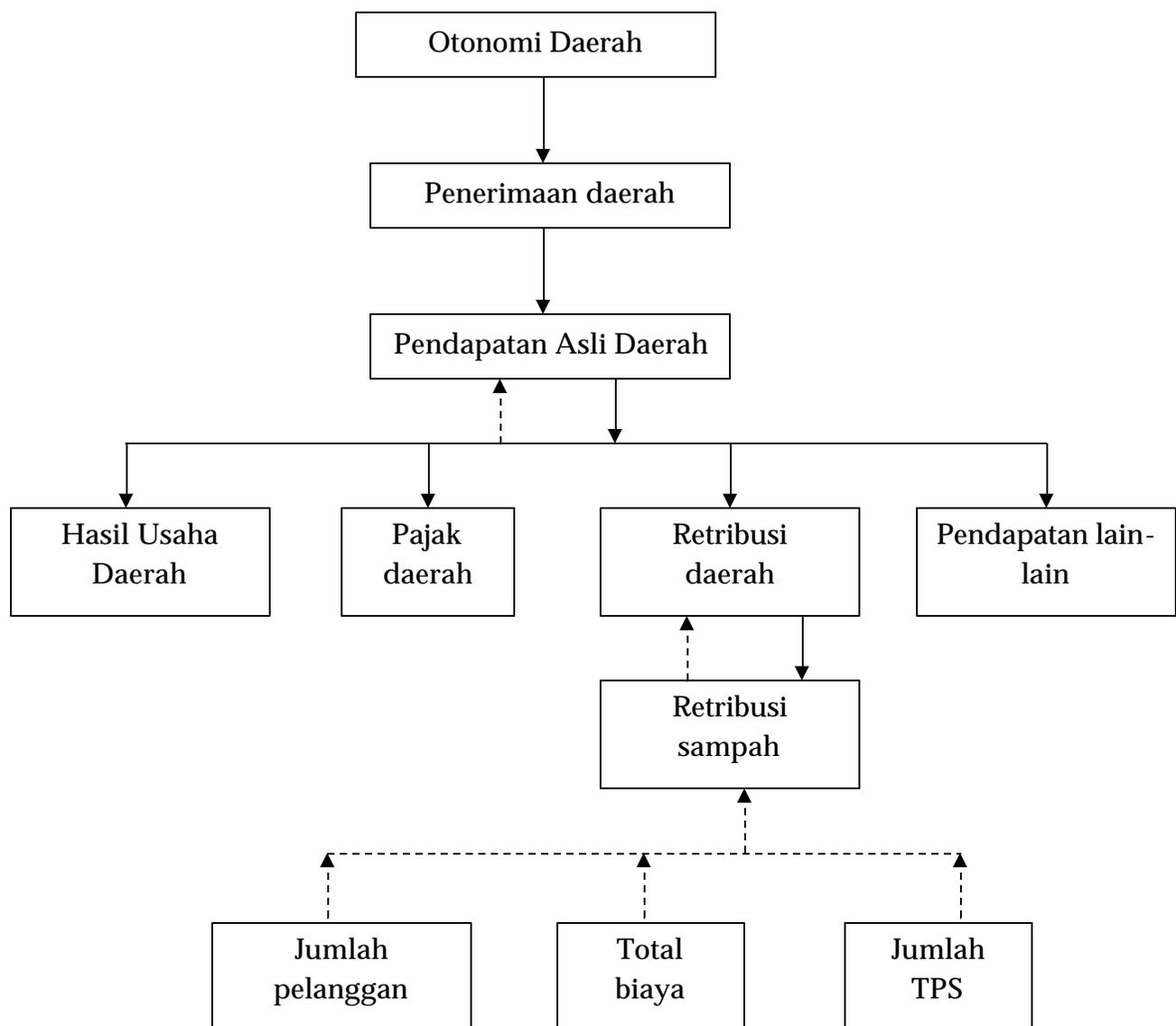
Retribusi dia atas biaya dapat juga dalam situasi operasi khusus dimana suatu pelayanan yang sama dikaitkan dengan penyediaan biaya. Retribusi di atas biaya ini analog dengan perpajakan, timbulnya dan pemerataannya harus dipertimbangkan. Bagian mana masyarakat yang membayar lebih dari suatu pelayanan, dan bagian mana menerima keuntungan dari kelebihan penerimaan.

E. Kerangka Pikir

Berdasarkan undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah pusat telah memberikan wewenang seluas-luasnya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, namun dalam kenyataannya PAD Kota Jayapura masih rendah, sumber pendapatan daerah yang utama masih bertumpu pada DAU.

Berkaitan dengan uraian di atas, maka penerimaan retribusi sampah terhadap kepatuhannya merupakan alternatif terbaik dalam upaya peningkatan penerimaan retribusi sampah serta memperbaiki kinerja penanganan yang selama ini dilakukan. Dengan demikian hasil yang diperoleh diharapkan dapat mencapai maksimal dimana gap antara

subsidi APBD dan pendapatan dari retribusi sampah bisa ditekan. Untuk jelasnya dapat dilihat secara skematis berikut ini.



Gambar 1. Skema Kerangka Pikir

F. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di muka, maka dikemukakan hipotesis sebagai berikut :

Diduga bahwa faktor pelanggan, total biaya dan jumlah TPS berpengaruh signifikan terhadap penerimaan retribusi sampah di Kota Jayapura.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kota Jayapura karena yang menjadi obyek penelitian adalah penerimaan retribusi sampah sedangkan subyek yang diteliti lembaga-lembaga yang terkait yaitu Dinas Pendapatan Daerah Kota Jayapura, Dinas Kebersihan Kota Jayapura dan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Jayapura.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang diperoleh dari instansi/lembaga yang terkait dengan penelitian ini yaitu Dinas Pendapatan Daerah Kota Jayapura Dinas Kebersihan Kota Jayapura, Bagian Keuangan Setda Kota Jayapura. Kantor Catatan Sipil Kota Jayapura dan Badan Pusat Statistik.

Data-data sebagaimana dimaksud berupa data dan perkembangannya selama 10 tahun terakhir yaitu tahun anggaran 1996 sampai dengan 2005 diantaranya berikut :

1. Data target dan realisasi retribusi sampah;